

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud dari sistem demokrasi yang dianut oleh Negara yang demokratis. Pemilu yang diselenggarakan secara transparan dan damai, serta menghasilkan pemimpin yang terpilih oleh suara mayoritas, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai Negara yang demokrasi.¹

Sistem pemilu merupakan wujud dari demokrasi perwakilan, secara sederhana diartikan sebagai penyaluran kedaulatan rakyat. Menurut Asshidique, dalam buku *Pemilu Empiris*, menjelaskan bahwa ada empat tujuan dari penyelenggaraan pemilu, yakni (1) untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai; (2) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; (3) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; (4) untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.²

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam sejarah perkembangan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sejak tahun 1955 Indonesia menerapkan

¹Diah Ayu Pratiwi, 'Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?', Jurnal FISIP Vol 2. No. 1, Universitas Riau Kepulauan, hlm. 14

² *Ibid.*

sistem pemilu representasi proporsional dan sistem multipartai sebagai sistem kepartaiannya. Pada tahun 1971 diawali perdebatan mengenai kemungkinan perpindahan ke sistem yang memungkinkan para anggota parlemen dapat dipilih secara langsung dengan menggunakan sistem pluralitas/mayoritas.³ Namun, pada pemilu Tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 sistem yang diterapkan tetap menggunakan sistem representasi proporsional dengan daftar calon tertutup.

Hasil penyelenggaraan pemilu dengan sistem proposional dengan daftar calon tertutup ini menunjukkan bahwa dalam pemilihan umum, partai lebih menonjolkan peranannya dari pada kepribadian seseorang. Hal ini memperkuat kedudukan pimpinan partai dari pada kader partai, maka dari itu tidak mengherankan jika timbul hubungan ketergantungan pada pimpin partai, yang telah memasukkan namanya dalam daftar calon.⁴

Pada era reformasi merupakan sebuah awal transisi demokrasi dari rezim otoriter menuju rezim yang demokratis. Pasca pemilu 1999, sistem Pemilu yang digunakan menjadi sistem proposional dengan daftar calon terbuka, sehingga hadirnya akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituen, dikarenakan rakyat mengetahui siapa yang dipilih dan siapa yang terpilih. Sistem ini membuat rakyat mempunyai peranan besar menentukan siapa yang menjadi wakilnya.⁵

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 tidak berbeda jauh yaitu menggunakan sistem proporsional dengan daftar semi terbuka dan

³ *Ibid.* hlm. 15

⁴ Aminah, 'Analisis Penerapan Sistem Proposional dan Sistem Distrik dalam Pemilihan Umum untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia ditinjau dari Asas Negara Hukum' Jurnal Vol. 1 No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hlm. 76

⁵ Diah Ayu, Op. Cit. hlm. 15-16

penentuan calon terpilihnya melalui suara terbanyak. Kelebihan dari sistem proporsional daftar semi terbuka adalah membuat masyarakat lebih selektif dalam memilih calonnya dan menyeleksi caleg secara rasional. pelaksanaan sistem pemilu proporsional daftar terbuka justru melahirkan sistem pemilu yang berpusat pada calon kandidat, dimana yang terjadi bukan kompetisi antarpol, melainkan kompetisi antar- calon dari partai.⁶

Partai politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.⁷

Pengelolaan keanggotaan sebuah partai merupakan bagian yang sangat mempengaruhi kualitas anggota partai politik. Pengelolaan keanggotaan sulit diketahui karena partai menganggap pengelolaan anggota partai sebagai urusan internal partai politik yang tidak perlu diketahui masyarakat luas dan enggan untuk diperbincangkan. Kerap tidak disadari bahwa untuk menciptakan sebuah demokrasi yang berkualitas diperlukan proses yang terbuka dan tepat dalam rekrutmen dan kaderisasinya.⁸

Kaderisasi dan rekrutmen merupakan dua hal yang merupakan bagian dalam proses mencetak seorang pemimpin. Dalam hal ini dapat kita lihat perbedaan dari

⁶ *Ibid.*

⁷ Ramlan Subakti, '*Memahami Ilmu Politik*', PT. Grasindo. Jakarta, 2010, hlm. 149

⁸ *Ibid.*

kaderisasi dan rekrutmen itu sendiri. Menurut Tead dalam buku *Pimpinan dan Kepemimpinan*, bahwa kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin pengganti di masa depan yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam lingkungan suatu organisasi. Oleh karena itu, proses kaderisasi kepemimpinan ini lebih mengacu pada sebuah proses untuk mengerakan sekumpulan orang menuju ke suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya paksaan.⁹

Sedangkan rekrutmen menurut Ivancevich, dalam buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, bahwa rekrutmen adalah sekumpulan kegiatan organisasi yang digunakan untuk menarik calon karyawan yang memiliki kemampuan dan sikap yang diperlukan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Rekrutmen dalam rekrutmen politik misalnya merupakan sebuah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.¹⁰

Menurut Firmanzah, menyebutkan bahwa Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakilinya. Ketika menjadi pemimpin nasional, otomatis menjadi pemimpin semua orang. Pemimpin ini tidak lahir

⁹ Insan Harapan Harahap, 'Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional', Jurnal Politik LIPI, Universitas Bakrie, hlm. 2

¹⁰ *Ibid.* hlm. 3

dengan sendirinya. Perlu suatu proses pendidikan baik formal maupun non formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin.¹¹

Kaderisasi dilaksanakan dalam suatu sistem yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kaderisasi. Kaderisasi bagi partai politik merupakan upaya yang penting, karena setiap partai harus mempersiapkan dan membina para kader untuk menjadi anggota partai yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kecakapan berorganisasi yang optimal.

Praktek kaderisasi partai politik di Indonesia masih jauh dari harapan, karena kegagalan kaderisasi tersebut banyak partai politik melahirkan kader-kader partai yang instan. Kader partai yang instan inilah membuat konfigurasi politik yang berjalan belum bersinergitas. Matinya kaderisasi di tubuh partai politik ini karena partai tidak mempunyai ideologi dan visi yang jelas. Maka dari itu sangat sulit untuk merekrut anggota. Dalam perekrutan perlu pesan yang dapat menarik perhatian orang dan dapat meyakinkan mereka untuk bergabung dalam partai. Tanpa dasar ideologi yang kuat pesan yang meyakinkan sangat sulit dikembangkan. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Selain melakukan proses rekrutmen, di dalam tubuh parpol perlu dikembangkan sistem pendidikan dan kaderisasi kader-kader politiknya.¹²

¹¹ Firmanzah, '*Mengelola Partai Politik*', edisi revisi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia hlm. 70

¹² Ibid.

Sistem kaderisasi perlu disertai dengan sistem transparansi yang memberikan jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi. Perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi partai politik. Kader dan calon pemimpin harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan itu. Karena, dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas tinggi.¹³

Selain itu, kaderisasi politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam Kaderisasi politik, antara lain melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lainnya. Kualitas kaderisasi pada dasarnya mempengaruhi kualitas kader yang disiapkan oleh partai, baik untuk mengisi jabatan kepengurusan di internal partai maupun dalam rangka mengisi jabatan publik di luar partai, di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif, di tingkat nasional dan daerah. Semakin tinggi kualitas sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai maka semakin baik pula kualitas kader yang dinominasikan partai untuk jabatan politik di dalam dan di luar partai.¹⁴

Dalam kompetisi pemilu akan menunjukkan kekuatan antar partai yang berupaya untuk memenangkan pemilu. Dalam hal ini, partai politik berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mempengaruhi massa yang ada. Karena itu,

¹³ *Ibid.* 71

¹⁴ Miman Nurdiaman, dkk, 'Analisis Proses Kaderisasi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Garut'. Jurnal, Vol.2 No.2 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Garut, hlm. 28

partai harus mempunyai kader-kader intelektual yang mempunyai wawasan pemikiran yang cukup baik. Dalam kaderisasi ini, partai politik berusaha menanamkan nilai-nilai dasar, tujuan, program partai yang bersangkutan, disamping ilmu-ilmu yang menunjang terhadap kekuatan partai.

Dari beberapa partai politik yang ada di Indonesia terdapat berbagai macam partai dan juga ideologi. Di Indonesia ada partai politik yang berbasis nasionalisme yaitu PDI Perjuangan sendiri mempunyai cara sendiri dalam pola kaderisasi di partai. Pola kaderisasi PDI Perjuangan yang berpola metodik dan juga sistematis yang dimana metode yang digunakan dalam pola kaderisasi ini bersifat menyeluruh dari tingkat pusat sampai tingkat terdaerah, sehingga pembinaan ini diikuti oleh seluruh anggota partai. Dengan adanya pola kaderisasi ini merupakan salah satu usaha dari partai politik dalam mempersiapkan sumberdaya manusia yang disiapkan untuk mengatur jalannya sistem pemerintahan.¹⁵

Kaderisasi PDI Perjuangan melalui pergerakan nasionalisme dengan ideologi Pancasila merupakan proses dimana setiap kader yang akan menjadi anggota PDI Perjuangan diwajibkan memahami tentang visi-misi partai, platform partai, tujuan dari partai politik, selain itu kader juga mampu untuk menerapkan sebagaimana PDIP Perjuangan ialah partai yang menyatakan diri sebagai partai nasionalisme.

¹⁵ Yeby Ma'asan Mayrudin, 'Dinamika Partai Politik Dan Positioning Ideologi', Jurnal Ilmu Politik, Vol. 2, No. 2 Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, hlm. 170

Para kader PDI Perjuangan lebih dituntut untuk mementingkan kemampuan untuk beranalisis dan membentuk suatu jaringan politik yang telah ada.¹⁶

Proses kaderisasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan berfokus pada pembentukan moral dari SDM kader internalnya yang kemudian dialokasikan pada gerakan untuk membenahi moralitas masyarakat, sebagai bagian dari solusi permasalahan bangsa. Format kaderisasi yang berbasis gerakan nasionalisme ini sudah berjalan dengan baik, setiap kegiatan program yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dapat diterima oleh masyarakat.¹⁷

Elektabilitas partai politik sangat mempengaruhi masyarakat, Istilah yang dipergunakan dalam pemilihan umum banyak yang masih sulit dicerna rakyat biasa. Apakah sekedar untuk popularitas dengan sering tampil, atau untuk meningkatkan elektabilitas. Dalam masyarakat sering diartikan, orang yang memiliki popularitas dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi.

Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer. Untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye yang dipergunakan.

Partai politik dikatakan memiliki elektabilitas jika memiliki daya pilih yang tinggi sesuai dengan kriteria keterpilihan dan popularitas. Dalam negara demokrasi partai-partai politik harus berupaya meningkatkan elektabilitasnya

¹⁶ *Ibid.* hlm. 171

¹⁷ Miman Nurdiaman, dkk, Op. Cit, hlm. 31

untuk dapat memenangkan pemilu, yang artinya mendapat mandat dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan.

Tabel 1.1 Tabel Perbandingan Perolehan Suara Parpol Pada Pemilu 2014 dan 2019 Secara Nasional :

No	Nama Partai	Tahun	
		2014	2019
1	PDIP	18,95 %	19,33 %
2	Gerindra	11,81 %	12,57 %
3	Golkar	14,75 %	12,31 %
4	PKB	9,04 %	9,69 %
5	PKS	6,79 %	8,21 %
6	PSI	-	1,86 %
7	Nasdem	6,68 %	9,05 %
8	Demokrat	10,19 %	7,77 %
9	PPP	6,53 %	4,52 %
10	PAN	7,59 %	6,84 %
11	Perindo	-	2,67 %
12	Berkarya	-	2,09 %
13	Hanura	5,26 %	1,54 %
14	PBB	1,46 %	0,79 %
15	PKPI	0,91 %	0,22 %
16	Garuda	-	0,50 %

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Perbandingan hasil Pemilu legislatif 2014 dan 2019 merupakan versi resmi rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat nasional dari KPU . Secara umum, PDI Perjuangan unggul dalam perolehan penghitungan 19,33 persen suara. Hasil ini lebih baik ketimbang hasil Pemilu 2014 dengan 18,95 persen.¹⁸ Dari

¹⁸ Nasional.kompas.com, Infografik: Perbandingan Suara Partai Hasil Pemilu 2019 dengan 2014. Diakses pada 10 Oktober 2020.

keseluruhan partai di parlemen , PDIP dan partai Gerindra mengalami tren kenaikan suara.

Tabel 1.2 Perbandingan Perolehan Suara Parpol Pada Pemilu DPR RI Tahun 2014 dan 2019 DPR RI Provinsi Jambi :

No	Nama Partai	Tahun	
		2014	2019
1	Golkar	288.724	360.297
2	PDIP	274.143	233.633
3	Gerindra	193.970	224.103
4	PAN	179.430	196.805
5	Demokrat	235.471	156.812
6	Nasdem	98.336	124.126
7	PKB	105.551	120.092
8	PKS	70.303	103.280
9	PPP	104.628	81.049
10	Perindo	-	55.752
11	Berkarya	-	50.770
12	PSI	-	37.461
13	PBB	39.203	18.212
14	Hanura	85.439	13.944
15	Garuda	-	7.857
16	PKPI	16.752	2.601

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Partai Golkar berhasil tampil kembali sebagai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) di Provinsi Jambi dengan meraih suara terbanyak pada Pemilu 2019. Berdasarkan hasil akhir rekapitulasi perolehan suara partai politik (Parpol) dari sembilan kabupaten dan dua kota se-Provinsi Jambi yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi di hotel BW Luxury, Kota Jambi, Sabtu

(11/5/2019), Golkar meraih 360.297 suara. Pada Pemilu 2014 Golkar juga menduduki peringkat pertama perolehan suara dengan jumlah 288.724 suara (17,06 persen)¹⁹

Hasil Pemilu Legislatif tahun 2019 di Provinsi Jambi menunjukkan pilihan politik warga Provinsi Jambi terhadap partai politik. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan suara partai politik Golkar yang bertahan di puncak antar partai politik, Golkar menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak pada pemilu 2019 dengan mengalami kenaikan perolehan suara dari Pemilu 2014 sebesar 288. 724 pada Pemilu 2019 menjadi 360. 297.

Sementara itu peringkat kedua perolehan suara terbanyak Pemilu 2019 di Provinsi Jambi tetap ditempati PDIP dengan jumlah 233.633 suara. PDIP juga menduduki peringkat kedua perolehan suara pada Pemilu 2014 dengan jumlah perolehan 274.143 suara (16,20 persen). Sedangkan Gerindra berada pada peringkat ketiga dengan perolehan 224.103 suara (Pemilu 2014 sekitar 193.970 suara atau 11,46 %).²⁰

Tabel 1.3 Tabel Perbandingan Perolehan Suara Parpol Pada Pemilu Legislatif DPRD 2014 dan 2019 Provinsi Jambi Dapil I Kota Jambi.

No	Nama Partai	Tahun	
		2014	2019
1	PDIP	37.313	46.811
2	Gerindra	36.371	56.977
3	Golkar	17.843	31.727
4	Demokrat	80.958	30.831

¹⁹ Radesman Saragih, Beritasatu, Minggu 12, Mei 2019, www.beritasatu.com, Diakses pada 14 Oktober 2020

²⁰ *Ibid.*

5	PAN	24.056	24.564
6	PKB	13.785	16.289
7	PKS	13.112	27.635
8	Nasdem	13.445	15.215
9	PPP	13.626	17.699
10	Perindo	-	8.330
11	Hanura	18.264	5.992
12	Berkarya	-	16.089
13	PBB	6.849	11.596
14	PSI	-	6.034
15	Garuda	-	1.111
16	PKPI	6.645	1.066

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi

Hasil Pemilu Legislatif tahun 2019 pada Dapil Kota Jambi menunjukkan hasil partai Gerindra keluar sebagai partai yang memperoleh suara dan 7 kursi terbanyak untuk lembaga perwakilan DPRD Kota Jambi. Sedangkan PDI Perjuangan mendapat 6 kursi dari dapil Kota Jambi pada pemilu tahun 2019, namun secara suara PDI Perjuangan naik dari pemilu 2014 yaitu 37.313 suara dan pada pemilu 2019 meningkat yaitu 46.811 suara. Dengan itu memberikan kursi di DPRD Kota Jambi dari kader PDI Perjuangan 6 kursi yang akan ditempati kader partai.²¹

Hasil pleno KPU Provinsi Jambi terkait rekapitulasi suara hasil pemilu tingkat DPRD Provinsi Jambi memastikan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu dengan meraup 9 kursi dengan perolehan 264.032 PDIP sendiri meraih dua kursi di dapil Jambi II, Batanghari-Muarojambi, Dapil Jambi 3, Merangin

²¹ Imcnews.id, 'Pleno KPU Kota Jambi Selesai, Ini daftar Anggota DPRD Kota Jambi Terpilih', Diakses pada 18 Oktober 2020

Sarolangun dan Dapil Jambi 5 Bungo-Tebo.²² Sementara di 3 dapil lainnya PDIP meraih satu kursi. Sementara Gerindra, Golkar, Demokrat dan PAN sama-sama meraih 7 kursi. Hanya saja, dari sisi perolehan suara peringkat kedua diambil Gerindra dengan perolehan suara 214.200 suara. Partai ini berhasil meraih dua kursi di dapil Kota Jambi.²³

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa PDI Perjuangan mendapat banyak massa untuk mendukungnya, terlihat dari hasil perolehan pemilihan umum legislatif di provinsi Jambi. Namun dalam perolehan DPRD dapil 1 Kota Jambi, calon legislatif dari PDI Perjuangan menempatin posisi kedua dan secara perolehan suara bagi PDI Perjuangan yang meningkat pada dapil 1 Kota Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa calon kandidat yang diusung oleh partai politik dapat mempengaruhi elektabilitas sebuah partai, tidak saja menjadi kendaraan dari kandidat tersebut dalam proses pencalonan, namun juga mampu menjadi mesin partai politik yang cukup efektif dalam menarik suara pemilih hingga elektabilitas partai dapat meningkat.

Maka peneliti mendapat gambaran bahwa dalam setiap partai politik memiliki dan menerapkan pola kaderisasi yang berbeda-beda yang turut menentukan kualitas para kadernya terhadap popularitas dan elektabilitas partai politiknya. Apabila masing-masing partai memahami dan menyadari bahwa tugas, peran, dan fungsi mereka sangat mempengaruhi popularitas dan elektabilitas partainya dengan adanya kaderisasi yang berkualitas.

²² www.jambiberita.com, Sabtu, 11 Mei 2019, Diakses pada 22 Oktober 2020

²³ *Ibid.*

Adapun beberapa hasil studi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peranan kaderisasi dalam meningkatkan elektabilitas partai politik adalah :

1. Vernanda Samuel dengan judul “ Pola Kaderisasi Partai Politik (Studi Deskriptif : Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2021) ”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran terhadap proses yang diteliti dan juga menganalisis makna yang ada dibalik informasi data dan proses pola kaderisasi partai. Kesimpulan dari penelitan ini adalah pola kaderisasi PKP Indonesia di Provinsi Sumatera Utara terdapat gambaran pelaksanaan pola kaderisasi yang bersifat baku dan berjenjang serta terbuka untuk umum. Namun pola rekrutmen politik dewan pimpinan Provinsi Sumatera Utara PKP Indonesia belum sepenuhnya berjalan aktif, hal ini bisa dilihat dari hanya 3 kadernya yang berhasil menduduki DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kiprah PKP Indonesia di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik dan mampu untuk bersaing dengan partai politik lainnya di Sumatera Utara, tetapi harus perlu adanya perbaikan dan peningkatan²⁴.
2. Deby Nurul Triasa dengan judul “ Sistem Kaderisasi Partai Golkar Era Reformasi (Studi Kasus Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011) “. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola rekrutmen politik yang dijalankan oleh Partai Golkar

²⁴ Vernanda Samuel, “ Pola Kaderisasi Partai Politik (Studi Deskriptif : Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2021) “, Skripsi Universitas Sumatera Utara FISIP, 2017

dalam merekrut calon anggota Partai Golkar, mengetahui kaderisasi politik yang dilaksanakan oleh Partai Golkar untuk melahirkan kader-kader partai sesuai dengan paradigma baru Partai Golkar . dan mengetahui pelembagaan politik Partai Golkar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan design penelitian statistik-deskriptif yang merupakan metode dengan menggunakan kuesioner sebagai salah satu teknik pengumpulan data dengan memberikan gambaran umum mengenai bentuk sistem kaderisasi partai Golkar di Jawa Tengah tahun 2011. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pola rekrutmen politik Partai Golkar di Era Reformasi bersifat terbuka dan tidak menyiapkan tim seleksi dalam rekrutmen calon anggota partai. Kaderisasi politik Partai Golkar sudah bagus, tetapi masih ada kendala masalah keuangan dan intruktur materi. Pelembagaan politik Partai Golkar belum sempurna karena masih adanya ketergantungan partai terhadap pihak-pihak yang berasal dari non partai.²⁵

Maka peneliti dapat melihat bahwa setiap partai politik dalam menciptakan kader yang berkualitas tentu memiliki sistem kaderisasinya sendiri dan sesuai dengan ciri khas ideologi partai politik tersebut. Kaderisasi merupakan urat nadi bagi semua organisasi termaksud partai politik, karena sistem kaderisasi adalah sebuah proses yang sangat penting yang dilakukan demi menjaga kesinambungan kepemimpinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

²⁵ Deby Nurul Triasa, “ Sistem Kaderisasi Partai Golkar Era Reformasi (Studi Kasus Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011) “ Skripsi Universitas Diponegoro, FISIP. 2011

Dari gambaran latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana peranan kaderisasi PDI Perjuangan dalam meningkatkan dan mempertahankan elektabilitas partai yang tinggi. Adakah aspek dari peranan kaderisasi terlepas dari elit parpol didalamnya. Penelitian ini melihat bagaimana peranan kaderisasi PDI Perjuangan khususnya di DPC PDI Perjuangan Kota Jambi, dengan mengangkat judul penelitian “ **Peranan Kaderisasi Dalam Upaya Meningkatkan Elektabilitas Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus PDI Perjuangan di Kota Jambi)** “.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pola Kaderisasi Politik PDI Perjuangan di Kota Jambi?
2. Bagaimana Peranan Kaderisasi yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan dalam meningkatkan Elektabilitas di Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pola kaderisasi politik PDI Perjuangan di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme model rekrutmen PDI Perjuangan di Kota Jambi.

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan kaderisasi yang dilaksanakan oleh kader PDI Perjuangan dalam meningkatkan Elektabilitas di Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini berupa:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih pemikir rancang untuk individu, bangsa dan negara guna memperluas khazanah keilmuan dalam bidang ilmu politik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi partai politik yakni PDI Perjuangan Kota Jambi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca gambaran bagaimana peranan kaderisasi PDI Perjuangan dalam upaya meningkatkan Elektabilitas pada Pemilu tahun 2019 di Kota Jambi. Sehingga dapat mengembangkan penalaran pembaca di bidang pengetahuan ilmu politik.

1.5 Landasan Konseptual

1.5.1 Kaderisasi

Kaderisasi merupakan suatu proses pengkaderan yang dilaksanakan secara terus menerus, sistematis dan konsisten mencakup tidak saja aspek kognitif tetapi juga motivatif.²⁶ Kaderisasi sangat penting mengingat perlu ada transfer pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam suatu kajian tertentu. Fungsi kaderisasi dalam partai politik adalah mempersiapkan calon-calon untuk siap menerima mengelola partainya ke depan. Kaderisasi juga merupakan proses untuk melatih dan mempersiapkan anggota partai dengan berbagai keterampilan, disiplin ilmu dan pengalaman untuk mencapai tujuan partai.²⁷

Pada dasarnya kaderisasi ditujukan untuk empat hal: Pertama, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai dan ideologi yang diperjuangkan partai serta visi, misi dan haluan perjuangan partai. Pemahaman ideologi partai menjadi penting karena ideologi partai menjadi dasar bagi perjuangan partai politik dan juga mendasari visi misi organisasi. Ideologi adalah susunan gagasan yang terorganisasi yang mempengaruhi satu sama lain dan menjadi pedoman bagi kelompok masyarakat atau negara untuk mencapai cita-citanya. Contohnya liberalisme, sosialisme, Konservatisme, Pancasila, Marhaenisme, Islamisme dsb.; Kedua, menumbuhkan militansi, salah satu caranya yaitu dengan penanaman ideologi atau yang biasa disebut visioning. Penanaman ideologi adalah faktor

²⁶ Sahid, M. *‘Sistem Kaderisasi Organisasi’*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 2010), hlm. 148

²⁷ Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *‘Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia’* (Jakarta: Penerbit Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016), hlm. 51

kunci pengkaderan yang dalam institusi merupakan bagian dari format pengkaderan formal dengan tahapan-tahapan yang dimatangkan oleh institusi yang bersangkutan.

Kaderisasi politik merupakan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik²⁸

a. Pendidikan Kaderisasi

Istilah kader atau kaderisasi (Proses Pengkaderan) bukan sekedar predikat formal yang dimiliki oleh seseorang karena mengikuti pendidikan dan latihan tertentu, dan karena berbagai sertifikat formal yang dimiliki. Istilah kader lebih mengacu pada dimensi substansial berupa kualitas perjuangan yang dimiliki seseorang. Kaderisasi dipandang sebagai upaya yang sistematis, terus menerus dan berkelanjutan secara konsisten untuk menumbuhkan, mengembangkan dan membentuk insan-insan pejuang bangsa dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Kaderisasi haruslah merupakan proses yang terus menerus, yang dirancang dan diarahkan secara tertib, teratur dan berjenjang.²⁹ Komponen utama kaderisasi adalah:

1. Pendidikan kader, dimana disampaikan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan.

²⁸ Suharno. 'Diktat Kuliah Sosiologi Politik'. Yogyakarta, 2004. hlm. 117

²⁹ Mangkubumi. '*Kerangka dan Konsepsi Politik Indonesia: Sebuah Tinjauan dan Analisa Perkembangan Politik Nasional Indonesia*'. (Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya. 1989), hlm. 59

2. Penugasan kader, dimana para kader diberi kesempatan untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi sebagai latihan pematangan dan pendewasaan.
3. Pengarahan karir kader, dimana para kader diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam berbagai aspek perjuangan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.³⁰

Maka dari prinsip kaderisasi bahwa dalam proses kaderisasi bukanlah agenda yang selesai dalam waktu yang singkat. Proses pendidikan hanya akan dapat berhasil ketika telah dijalankan secara simultan dan menyentuh aspek yang menyeluruh. Tidak sekedar mengajar tapi mendidik. Tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, namun memaksimalkan aspek afekti dan psikomotorik. Dalam kegiatan ini, yang perlu dilakukan adalah peningkatan pengetahuan aspek kognitif dan peningkatan kesadaran dan dorongan berjuang bersifat motivatif.³¹

b. Pengembangan Kaderisasi

Pengembangan kader bertujuan untuk mematangkan dan mendewasakan kader melalui tantangan yang terdapat di tengah masyarakat, melalui akumulasi pengalaman dan penghayatan atas kehidupan masyarakat, sehingga menumbuhkan suatu bentuk kemampuan nyata sekaligus kearifan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Pada tahap lebih lanjut, para kader diharapkan dapat mencari dan menemukan secara kreatif tantangan-tantangan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* hlm. 60

tersebut dalam penghayatan dan pengumpulannya di tengah masyarakat. Dengan demikian kemandirian akan tumbuh dan berkembang dalam dirinya, perjuangan mereka akan menjadi bagian dari jiwa dan kehidupannya. Pematangan dan pendewasaan kader inilah yang dirasakan sekarang ini sebagai bagian yang cukup sulit dalam melakukan kaderisasi³²

Dalam pengembangan kaderisasi mencakupi pada aspek peranan kaderisasi :

1. Pewarisan nilai-nilai organisasi yang baik

Proses transfer nilai adalah suatu proses untuk memindahkan sesuatu (nilai) dari satu orang ke orang lain. Nilai-nilai ini bisa berupa hal-hal yang tertulis atau yang sudah tercantum dalam aturan-aturan organisasi (seperti Konsepsi, AD ART, dan aturan-aturan lainnya) maupun nilai yang tidak tertulis atau budaya-budaya baik yang terdapat dalam organisasi.

2. Penjamin keberlangsungan organisasi

Organisasi yang baik adalah organisasi yang mengalir, yang berarti dalam setiap keberjalanan waktu ada generasi yang pergi dan ada generasi yang datang keberlangsungan organisasi dapat dijamin dengan adanya sumber daya manusia yang menggerakkan, jika sumber daya manusia tersebut hilang maka dapat dipastikan bahwa organisasinya pun akan mati. Regenerasi berarti proses pergantian dari

³² *Ibid.* hlm. 62

generasi lama ke generasi baru, yang termasuk di dalamnya adanya pembaruan semangat.

3. Sarana belajar bagi anggota

Tempat di mana anggota mendapat pendidikan yang tidak didapat di bangku pendidikan formal. Pendidikan itu sendiri berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam proses mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan³³.

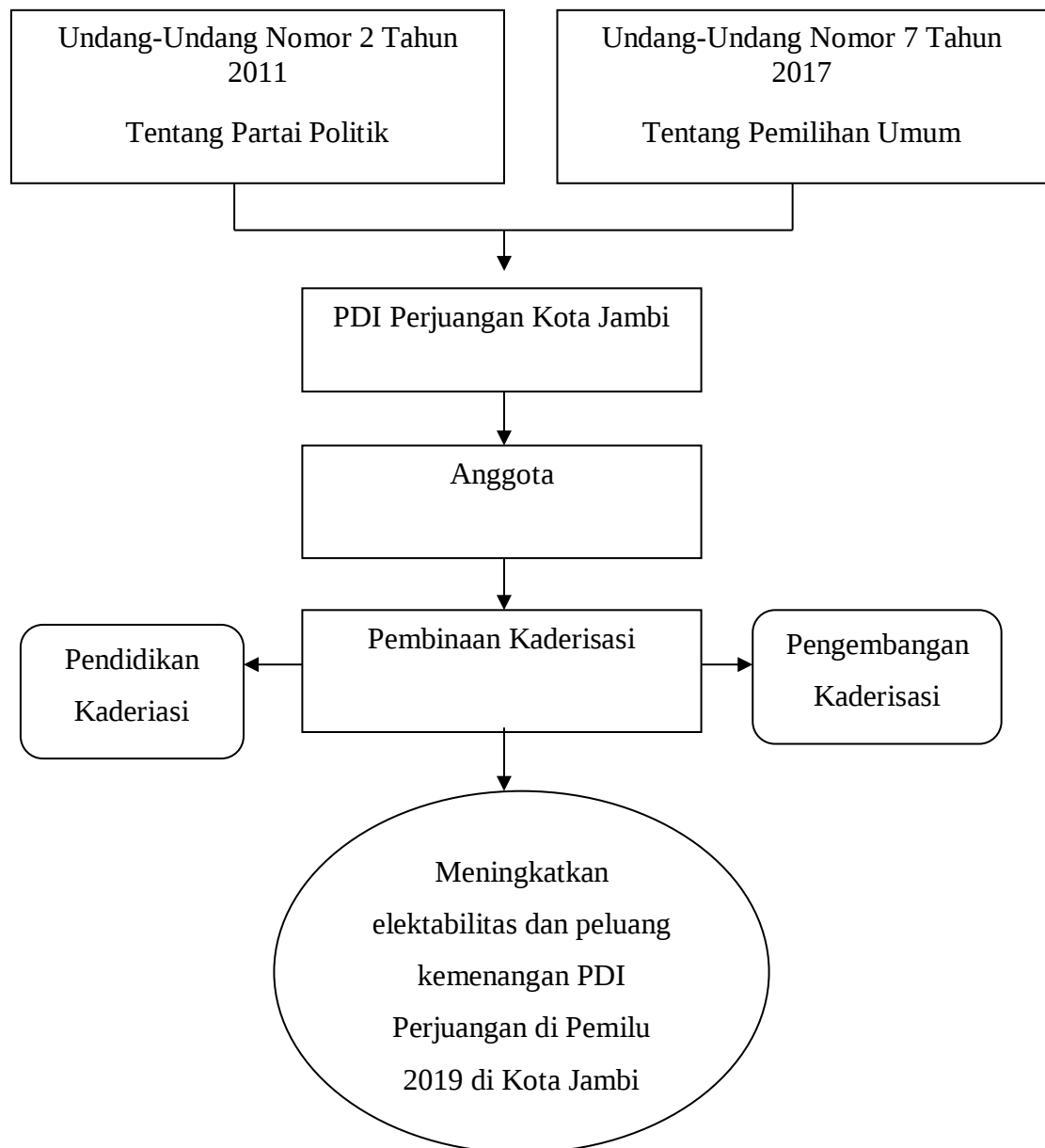
Selain terkait dengan upaya membangun militansi anggota, kaderisasi juga dapat digunakan oleh partai politik sebagai upaya peningkatan kapasitas kader partai dalam kaitan tata kelola partai politik, peningkatan kapasitas kader partai yang akan menduduki jabatan-jabatan publik seperti DPR/DPRD dan birokrasi pemerintahan. Dalam kaitan ini kaderisasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang berbagai ketrampilan yang harus dimiliki oleh anggota partai politik yang akan menduduki posisi strategis pada institusi-institusi publik di atas.³⁴

³³ *Ibid.* hlm 64.

³⁴ Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Op.Cit*, hlm. 53

1.7 Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir



Keterangan :

Bila dilihat dari skema kerangka berpikir tersebut, dari beberapa indikator untuk dapat menunjukkan sistematis dalam penelitian ini. Berawal dengan adanya Peraturan Undang-Undang No. 7 Tentang Pemilihan Umum menegaskan secara prosedural mengenai segala hal terkait pemilu. Lalu masuk pada peranan partai politik untuk mencetak pemimpin, dalam menjalankan itu diperlukan suatu proses yaitu, berawal dari rekrutmen anggota, setelah itu lanjut pada tahap jalannya sistem kaderisasi yang menjadi modal kader untuk terjun ke masyarakat. lalu saat adanya pemilu, kader yang terpilih dari partai mereka sudah memiliki kemampuan marketing politik dan dapat memasarkan ide-idenya, hingga kiprah para calon tersebut mendapat sorotan masyarakat dan disisi lain dapat memberinya peluang kemenangan dalam keterpilihan Pemilu di Kota Jambi.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu Cara Ilmiah, Data, Tujuan, dan Kegunaan.³⁵

1.8.1 Jenis penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative methods*) yaitu metode penelitian yang mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang

³⁵ Prof.DR. Sugiyono, Metode Penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D, hlm.213

terlibat dalam kejadian tersebut, kapan terjadinya, dan dimana tempat kejadiannya.

Peneliti kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti Kualitatif harus bersifat “*perspektif emic*” artinya memperoleh data bukan “sebagai mana seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang terfikir oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan/sumber data.³⁶

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan data-data dan informasi dari objek yang diteliti. Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Jambi, Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan data maupun informasi bisa langsung didapat dari lokasi yang telah ditentukan oleh penulis.

1.8.3 Fokus Penelitian

Untuk membatasi studi dalam penelitian digunakan batasan masalah yang disebut dengan fokus penelitian, fokus penelitian mengungkapkan data yang akan dikumpulkan dan dalam pelaksanaannya bias menambah dan menggeser penelitian. Fokus penelitian secara tersurat berisi mengenai definisi operasional yang digunakan dalam penelitian, dimana terdapat indikator-

³⁶ Ibid. hlm. 213

indikator penelitian. Secara langsung indikator-indikator ini akan mampu menyaring berbagai informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.³⁷

Fokus penelitian memberikan batasan studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam pembatasan ini penelitian akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan mengenai peranan kaderisasi PDI Perjuangan dalam upaya meningkatkan elektabilitas di Kota Jambi. Penelitian ini menempatkan partai politik di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), dan mengkajinya kondisi yang terjadi dalam kultur partai politik.

1.8.4 Sumber Data

Kaelan menyatakan bahwa sumber data adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman dan guru dalam penelitian sedangkan. Menurut Lofland, sumber data adalah semua bentuk kata-kata dan tindakan sedangkan sumber data tambahan adalah berupa dokumen tertulis, foto rekaman dan lain-lain. Dapat disimpulkan data adalah segala bentuk informasi fakta dan realitas yang terkait dengan apa yang diteliti atau dikaji. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu³⁸:

a. Sumber Data Utama (*Primer*)

³⁷ Ibid. hlm. 207

³⁸ Suharsimi Arikunto, '*Manajemen Penelitian*', (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), hlm. 107

Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan informan.

b. Sumber Data Tambahan (*Sekunder*)

Data yang diambil dari studi kepustakaan berupa tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan data primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, majalah, jurnal dan hasil penelitian.³⁹

1.8.5 Teknik Pengumpulan Informan

Teknik penentuan informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu memilih sample berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi⁴⁰.

Tabel 1.4 Informan Peneletian

No	Nama	Jabatan	Alasan
1	Ir. M. A. Fauzi	Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jambi	Selaku ketua tentu paling mengetahui informasi mengenai DPC PDIP
2	Maria Magdalena, S.S.	Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jambi Bidang Kaderisasi dan Ideologi	Karena tentu mengetahui informasi mengenai aspek kaderisasi dan ideologi DPC PDIP
3	Basmar	Wakil Ketua DPC PD Perjuangan Kota Jambi Bidang	Selaku anggota partai politik PDIP tentu mengetahui kultur

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Sugiyono, Op. Cit. hlm. 224

		Komunikasi Politik	internal partai
4	• Reza • Nurchalis • Supranoto	Kader DPC PDI Perjuangan Kota Jambi	Selaku anggota partai politik PDIP tentu mengetahui kultur internal partai
5	Dr. Fikri Riza, S.Pt, SH, MH.	Pengamat Politik	Karena mengetahui aspek politik dalam jalannya pemilu di Kota Jambi

Pemilihan informan tersebut karena informan lebih mengetahui gejala atau fenomena yang terjadi dalam kaderisasi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Jambi.

1.8.6 Teknik Pemngumpulan Data

a. Wawancara Mendalam (*in depth interview*)

Wawancara mendalam atau *in depth interview* yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam obyek.⁴¹

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.⁴²

⁴¹ *Ibid.* hlm. 141

⁴² *Ibid.* hlm. 143

Dalam hal ini yang terkait dengan peranan oleh kader partai politik PDI Perjuangan di Kota Jambi.⁴³

1.8.7 Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa “*Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others*” Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁴

Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu model analisis interaktif Miles dan Huberman. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu:⁴⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

⁴³ *Ibid.* hlm. 145

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 244

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 246

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miled dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada temuan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

1.8.8 Keabsahan Data / Triangulasi

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti agar dapat melihat keabsahan atau validitas data

yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung dengan cara mengecek kembali sumber informasi yang telah didapat. Menurut Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁴⁶

Dari tiga jenis triangulasi tersebut, penulis memilih keabsahan data dengan pendekatan triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data.⁴⁷

Untuk mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian. Dengan demikian analisis data menggunakan metode triangulasi sumber. Selanjutnya pendekatan triangulasi dilakukan menurut sudut pandang para informan yang berbeda mengetahui keabsahan data yang diperoleh peneliti terkait kaderisasi. Proses triangulasi sumber akan dilakukan pada Sekretaris, Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan Kota Jambi. Ketua dan anggota DPC PDI Perjuangan Kota Jambi serta Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Jambi.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 189

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 191